



SOSIALISASI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL SKSG UI : PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN NASIONAL BAGI GENERASI MUDA ACEH

Oleh

Arthur Josias Simon Runturambi¹, Fachrur Razi²

^{1,2}Kajian Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia

Email: ¹a.josias@ui.ac.id, ²senatorfachrulrazi@gmail.com

Article History:

Received: 15-08-2023

Revised: 07-09-2023

Accepted: 21-09-2023

Keywords:

Pengabdian
Masyarakat,
Kesejahteraan,
Ketahanan Nasional,
SDGs.

Abstract: Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia melakukan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan tema kegiatan “Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional: Sosialisasi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI Bagi Generasi Muda Aceh”. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Universitas Syiah Kuala, Bumi Moro (Aceh Besar) dan Kepulauan Sabang. Tujuan kegiatan ini selain mensosialisasikan program Ketahanan Nasional juga dapat memberikan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Aceh serta pemahaman tentang pengelolaan wilayah perbatasan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Metode dalam kegiatan ini adalah sosialisasi program studi Ketahanan Nasional dan kajian isu strategis berkaitan dengan tema yang dilakukan dengan beberapa tahapan di beberapa lokasi, diantaranya rumah singgah Bumi Moro dengan tujuan ingin mengetahui situasi dan perkembangan pasca bencana tsunami tersebut dan FGD yang digelar di Universitas Syiah Kuala Aceh, sosialisasi program studi Ketahanan nasional di Lanud Sabang dan kegiatan pengabdian masyarakat di pulau Iboih (pantai Rubiah) dengan pemuda setempat. Dalam kegiatan ini pengabdian mengikutsertakan instrumen dengan analisa pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah maritim yang luas dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun demikian Indonesia juga memiliki tantangan yang harus diwaspadai termasuk ancaman yang datang dari internal negara maupun eksternal. Ancaman yang datang tersebut dapat membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Indonesia harus bisa mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara serta pemerintahan dari ancaman-ancaman yang datang tersebut. Salah satu caranya



adalah dengan memperkuat Ketahanan Nasional dalam kehidupan bernegara¹. Ketahanan Nasional dapat terbentuk jika seluruh elemen masyarakat Indonesia ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya selain itu ketahanan nasional kuat atau lemah sangat ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas serta mobilitas dan produktivitas penduduknya, sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya².

Provinsi Aceh merupakan wilayah paling barat Indonesia, terdapat Tujuh pulau terluar yakni Pulau Simeulue Cut, Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Batee Lheblah, Pulau Rondo dan Pulau Weh. Tujuh pulau ini terletak di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu India, Thailand dan Malaysia. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan perairan internasional, tentunya perlu dikembangkan potensi perekonomian masyarakat sekaligusantisipasi dalam aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, persoalan keamanan, imigrasi, *trafficking*, dan kejahatan lintas batas lainnya tentu menjadi persoalan serius yang harus selalu diperhatikan dan diwaspadai sejak dini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah program pengabdian masyarakat Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dengan memberikan pembelajaran, pemahaman dalam menguatkan ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, pembangunan karakter nasionalisme dan menggali pemahaman setiap perbedaan pandangan politik masyarakat Aceh serta mendalami hasil penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang UU PA (Pemerintahan Aceh) di Aceh melalui kegiatan pengabdian masyarakat Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Pengabdian Masyarakat tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan generasi muda dalam mencintai dan melestarikan nilai-nilai nasionalisme serta meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, khususnya bagi para warga masyarakat dan pemerintahan di Aceh karena bila sumber daya manusianya meningkat tentu akan menjadi harapan bangsa di masa depan.

Dalam melaksanakan pendidikan ketahanan nasional dan pemahaman wawasan kebangsaan pada masyarakat Aceh, Prodi Kajian Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Universitas Indonesia yang mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi ini memiliki program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi PKN UI bekerjasama dengan Komite I DPD RI. Dalam program ini, Program Studi PKN melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Aceh dengan judul kegiatan "Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional: Sosialisasi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI Bagi Generasi Muda Aceh".

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat di Aceh ini diharapkan dapat memberikan

¹ Hanita, Margaretha. "Ketahanan Nasional Teori, Adaptasi dan Strategi". Jakarta, UI Publishing (2021)

² Djoharis Lubis. "Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya Dari Perspektif Kependudukan". Jurnal



pemahaman dan penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman terhadap ketahanan sosial budaya agar terciptanya pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah secara berkelanjutan dan paling utama dari pengabdian masyarakat ini adalah dapat terjalinnya kerjasama antara Universitas Indonesia dan Universitas Syiah Kuala dalam menerapkan kajian keilmuan Ketahanan Nasional.

METODE

Dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action research* dimana Prodi PKN dan Komite I DPD RI sama-sama menentukan jenis kegiatan dan pelaksanaan yang akan dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan metode analisis situasi, identifikasi masalah, dan penentuan prioritas masalah. Kegiatannya berupa rangkaian tahapan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan laporan. Pada tahap persiapan diawali koordinasi dengan Komite I DPD RI sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian baik di kampus Universitas Syiah Kuala dan tempat lainnya. Pada tahap pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan adalah tinjauan dan pemaparan materi wawasan kebangsaan pada anak-anak yatim dan dhuafa di Rumah Singgah Bumi Moro dan juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ditempatkan di Kampus Unsyiah Kuala. Selain itu, tahapan pelaksanaan yang lain adalah kegiatan sosialisasi program kerjasama prodi ketahanan nasional antara Universitas Indonesia dan Unsyiah Kuala pada satuan Danlanal Sabang, dan dihadiri Satradar Sabang, Lanud Sabang dan Sat Marinir Sabang. Selain itu kegiatan di Sabang dilakukan dengan peninjauan tugu 0 kilometer dan penelitian di Pulau Rubiah.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tim mengurai beberapa kegiatan tersebut dengan pengukuran analisa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs). Dalam kegiatan ini difokuskan atas dua dimensi, yaitu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan lingkungan (ketahanan nasional) namun saling berkaitan dengan program pembangunan lainnya.

HASIL

Tahapan dan Pemetaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Aceh

Diskusi Reformasi UU PA (Pemerintahan Aceh) dan Kunjungan ke Rumah Singgah "Bumi Moro"

Kegiatan pengabdian masyarakat di Aceh, pelaksanaannya dimulai dengan koordinasi dengan Komite I DPD RI sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian di kampus Universitas Syiah Kuala yang akan menjadi fasilitator kegiatan Pengmas PKN UI, sebagaimana telah dipersiapkan dan dimatangkan di Jakarta saat melakukan rapat koordinasi dan persiapan dengan bapak Fachrur Razi Ketua Komite I DPD RI yang membahas rencana titik-titik lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Aceh.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Aceh dilaksanakan mulai tanggal 27-29 Maret 2022. Kegiatan diawali diskusi ringan di ruang transit VIP Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh sembari menunggu rombongan lain yang belum *landing* di Bandara Aceh. Rombongan yang berada VIP tersebut sembari ngobrol santai antara lain wakil ketua DPD RI, anggota DPD RI Komite I, tenaga ahli Lemhannas, Direktur SKSG dan Prodi Ketahanan Nasional Universitas Indonesia serta mahasiswa PKN Universitas Indonesia. Obrolan sepanjang diskusi itu membahas hal ihwal pemerintahan Aceh dari berbagai perspektif, baik ekonomi, budaya dan



politik nasional. Hasil obrolan santai tersebut mengarah terhadap perlunya perubahan UU PA Aceh yang dinilai kurang efisien apalagi terkait Otonomi Khusus Aceh, termasuk soal anggaran yang tahun ini semakin menurun hal ini perlu dilakukan agar dapat menguatkan pemerintahan Aceh.

Setelah diskusi, rombongan pengmas mengunjungi rumah singgah panti sosial bekas korban tsunami Aceh 2004 yang diprakarsai dan dikelola oleh Bapak Letjen (purn) Nono Sampono. Rombongan yang ikut serta ke rumah singgah ini selain Pak Nono Sampono antara lain Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPD Dapil Banten Habib Ali Alwi, Anggota DPD Dapil DIY Hilmy Muhammad, Anggota DPD Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri dan tim Universitas Indonesia yang terdiri dari Direktur SKSG Athor Subroto, Kaprodi Kajian Ketahanan Nasional A. Josias Simon Runturambi serta alumni dan mahasiswa UI³.



Gambar 1. Tim pengmas (DPD dan UI) saat memberikan wawasan kebangsaan terhadap anak-anak panti asuhan yang diharapkan menjadi generasi bangsa

Namanya Bumi Moro, sebuah panti asuhan yang dibangun di atas tanah 7000 meter yang diwakafkan oleh warga sekitar, lokasi ini beralamat di Jl. Cot Reubek IV No.45, Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Rumah singgah ini dibangun Bapak Nono Sampono untuk menampung 72 orang korban tsunami yang terdiri dari anak-anak dan dewasa, mereka yang kehilangan keluarganya akhirnya dibuatkan rumah yang dibangun dengan puing-puing bekas tsunami dan bekas rumah sakit darurat saat itu. Saat itu Nono Sampono menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut yang menerjunkan anggotanya untuk membantu mencari korban tsunami.

Kini setelah 17 tahun berlalu, 72 korban tsunami yang ditampung di panti asuhan Bumi Moro sudah memiliki profesi masing-masing, ada yang menjadi anggota TNI-Polri, bekerja di pemerintahan bahkan ada yang kerja di Jakarta, dan saat ini panti asuhan ini menampung anak-anak yatim dan dhuafa yang berjumlah 30 orang.

Dalam kunjungannya, Nono Sampono memotivasi anak-anak yatim tersebut agar

³ <https://poskota.co/nasional/wakil-ketua-dpd-ri-kunjungi-panti-asuhan-bumi-moro-aceh-besar/>

senantiasa berbuat yang terbaik serta terus menjadi seorang yang berprestasi untuk meraih cita-cita demi masa depan dan dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara, selalu giat belajar dalam menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Dalam kegiatan ini tim Universitas Indonesia yang diwakili Bapak Dr. A Josias Simon Rumturambi, M.Si, Kaprodi Ketahanan Nasional UI juga memberikan arahan serta wejangan kepada adik-adik yatim untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, tidak patah semangat dan terus mengejar cita-cita setinggi langit. Bapak Athor Subroto, direktur SKSG juga menyampaikan pesan kepada adik-adik yatim agar terus memperhatikan pendidikannya dan bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti masuk Universitas Indonesia, tujuannya agar cita-cita yang diidamkan mulai sejak kecil dapat terwujud dengan baik bila dibarengi dengan pendidikan yang baik pula. Tim Universitas Indonesia juga memberikan *merchandise* atau oleh-oleh berupa tas, buku, pulpen dan kaos berlogo UI yang diberikan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk penyemangat dan kasih sayang. Kegiatan ini ditutup dengan memberikan santunan kepada anak yatim oleh rombongan dari DPR RI.

FGD di Unsyiah dan Penandatanganan Kerjasama Prodi Ketahanan Nasional SKSG UI

Setelah kegiatan di Bumi Moro ini, dilanjutkan esok harinya Senin tanggal 28 Maret 2022 kegiatan inti dari pengmas ini yaitu FGD yang diselenggarakan di aula kampus Unsyiah dengan pemaparan para ahli di bidang pengelolaan strategis pada wilayah perbatasan di Aceh ini. Kegiatan ini disebut inti karena selain membahas persoalan bagaimana mewujudkan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan juga melakukan sosialisasi program ketahanan nasional Universitas Indonesia. FGD ini dihadiri antara lain Dosen Universitas Indonesia, Unsyiah Kuala, DPD RI, Bakamla, dan BNPP serta kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU pendirian Program Studi Kajian Ketahanan Nasional di Unsyiah Kuala Aceh, pendirian ini ditandatangani oleh Direktur SKSG Bapak Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Kuala Bapak Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes dan kegiatan ini merupakan program kerjasama antara Universitas Indonesia, Unsyiah Kuala dan Lemhannas RI yang dihadiri langsung oleh Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, Tenaga Ahli Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI.



Gambar 2. Penandatanganan MoU pendirian Prodi Ketahanan Nasional UI di Unsyiah Kuala Aceh, oleh Direktur SKSG Bapak Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Kuala Bapak Dr. Drs. Syamsulrizal, M.Kes



Setelah kajian kewilayahan perbatasan ini yang dikemas FGD, tim pengmas langsung meninjau beberapa wilayah di Sabang antara lain Lanud Sabang untuk sosialisasi program ketahanan nasional serta meninjau sistem pertahanan di wilayah perbatasan dengan negara lain, selain itu juga meninjau lokasi situs budaya di Pulau Rubiah, dan ke pesisir pantai Iboh untuk melihat potret kehidupan masyarakat setempat serta terakhir mengunjungi Tugu 0 Kilometer.

Silaturahmi dengan Matra TNI di Pulau Weh atau Sabang

Selanjutnya, setelah kegiatan FGD di Unsyiah Kuala, rombongan tim Universitas Indonesia langsung menyeberang laut menuju pulau terluar yakni pulau Weh atau pulau Sabang dan menyambangi Lanal Sabang. Setiba disana sore hari, rombongan diterima oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M, serta beberapa kesatuan lain yang juga mendampinginya yaitu Satradar Sabang, Lanud Sabang dan Komandan Marinir Sabang.

Dalam pertemuan tersebut, sebelum diskusi soal kondisi keamanan Kota Sabang, tim Universitas Indonesia menyampaikan maksud dan tujuan datang ke Aceh, yakni melakukan FGD tentang pengelolaan wilayah perbatasan dan melakukan kerjasama pendirian Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dengan Unsyiah Kuala. Komandan Lanal menyambut baik kedatangan kami bahkan ada beberapa tim mahasiswa Universitas Indonesia yang juga anggota TNI berpangkat Kolonel dan Kapten, selain itu Danlanal tertarik program pascasarjana prodi kajian Ketahanan Nasional yang kerjasama dengan Unsyiah Kuala dengan begitu dia bisa memerintahkan anggotanya yang ingin melanjutkan kuliah S2 di Aceh dengan jurusan Ketahanan Nasional.



Gambar 3. Pertemuan antara tim pengmas UI dan jajaran matra TNI di Sabang membahas soal sosialisasi prodi Ketahanan Nasional UI

Setelah sesi pengenalan program studi kajian Ketahanan Nasional, Danlanal juga menjelaskan tentang kondisi kota Sabang yang merupakan pulau terluar atau lokasi titik 0 kilometer negara Indonesia. Pulau Sabang dulunya memiliki pelabuhan yang terkenal dan paling ramai sampai ada istilah pelabuhan bebas, karena saking berkembangnya hingga akhirnya masa kejayaan merosot setelah tahun 1985. Status Sabang sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985. Pencabutan status ini dengan alasan maraknya penyelundupan dan akan dibukanya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas. Secara geografis, sebenarnya posisi Sabang lebih strategis dibandingkan dengan Batam. Sabang terletak di pintu bagian barat Selat Malaka yang dilintasi 50.000-60.000 kapal setiap tahun. Lebih lanjut Danlanal menyebut Kota Sabang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, meski hampir tidak ada bentuk kejahatan yang nyata karena satu pulau tersebut terintegrasi keamanannya.

Mengunjungi Titik 0 Kilometer dan Situs di Pulau Rubiah

Setelah kegiatan dengan Lanal Sabang, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pantai Iboh dan bermalam disana, karena rencana awal mengejar waktu melihat pemandangan sunset di titik 0 kilometer, namun karena terlalu sore di lanal yang akses ke titik 0 kilometer ditempuh sekitar satu jam maka rombongan mengurungkan niatnya dan melanjutkan pada pagi harinya.

Pada pagi hari, setelah tim Universitas Indonesia bangun pagi, mereka melanjutkan rencananya yaitu olahraga pagi sambil berlari santai menuju titik 0 kilometer yang berjarak dari penginapan sekitar 8 kilometer dengan medan yang naik turun dan berbelok. Mereka berangkat pukul 07.00 dan tiba di lokasi sekitar jam 08.00. Setelah mereka sampai di tugu titik 0 kilometer mereka mengambil dokumentasi untuk dijadikan kenang-kenangan karena lokasi ini sangat hits mengingat tempat ini adalah titik dimana jarak negara Indonesia diukur dari lokasi ini.



Gambar 4. Tim pengmas UI saat berada di tugu titik kilometer 0 di Sabang

Setelah tim pengmas Universitas Indonesia mengunjungi tugu titik 0 kilometer, mereka kembali ke Villa dan melanjutkan wisata snorkeling di pantai pulau rubiah yang lokasinya tidak jauh dari pantai Iboh, hanya naik perahu kecil dari *Teupin Layeu* yaitu pantai sekaligus pelabuhan untuk penyeberangan ke pantai Pulau Rubiah. Di pantai rubiah pesona alam bawah lautnya sangat indah dipenuhi ikan-ikan hias laut yang warna warni. Di pulau ini terdapat makam seorang perempuan yang namanya kemudian diabadikan sebagai nama dari pulau ini. Cut Nyak Rubiah namanya. Selain itu, ada juga beberapa makam lain yang menurut warga merupakan makam anak-anak Cut Nyak Rubiah. Sejumlah sumber mengatakan nama perempuan itu adalah Ummi Sarah Rubiah, istri dari seorang ulama Tengku Ibrahim atau Tengku Iboh. Nama sang istri abadi menjadi nama Pulau Rubiah, sedangkan nama ulama tersebut dijadikan sebagai nama Desa Iboh. Pulau Rubiah Sabang juga menyimpan sejarah perhajian Indonesia. Sekitar tahun 1920 di zaman Belanda, di pulau ini dibangun pusat



karantina haji yang pertama di Indonesia. Di sinilah tempat lalu-lalang kapal jemaah haji yang pulang-pergi dari tanah suci Mekkah⁴.



Gambar 5. Situs makam Cut Nyak Siti Rubiah yang berada di Pulau Rubiah

Setelah melakukan wisata snorkling di pantai rubiah, beberapa tim UI bergegas menuju Villa dan bersiap-siap kembali melakukan penyeberangan ke Banda Aceh lagi untuk kembali ke Jakarta pada hari ketiga tersebut. Namun pada saat hendak berangkat menuju pelabuhan, Tim UI mengikuti acara yang di selenggarakan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Walikota Sabang Bapak Nazaruddin dan tidak lama setelah acara tersebut sebagian tim UI meninggalkan Iboih dan menuju pelabuhan Ule Lheue.



Gambar 6. Tim Pengmas saat membentangkan spanduk kegiatan pengmas UI di pantai Rubiah

⁴<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/01/21/menikmati-surga-alam-bawah-laut-di-pulau-rubiah-aceh>

DISKUSI

Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional

Dalam FGD ini, materi pertama disampaikan oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang menjelaskan Pengelolaan Perbatasan Negara Perspektif DPD RI. Dalam memulai materinya dia menjelaskan dulu tugas dan fungsi DPD, diantaranya adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Selain itu tugasnya adalah menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Fachrul Razi membagi materinya menjadi topik utama diantaranya tentang Wilayah Negara yang menjelaskan tentang kebijakan terkait penyelesaian batas kewilayahan di darat dan di laut dan pengamanan kawasan perbatasan serta arah dan kebijakan pembangunan perbatasan negara khususnya dalam menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Indonesia. Kedua tentang Ketahanan Nasional yang mengupas masalah eksternal dan internal bangsa Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional serta bagaimana aktualisasi pancagatra dan trigatra dewasa ini sebagai instrument ketahanan nasional

Ketiga soal Perbatasan Negara, dan hal ini berkaitan dengan peran strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD) dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di perbatasan negara serta penanganan persoalan perbatasan antara lain penyelundupan manusia dan barang serta kejahatan transnasional.



Gambar 7. Kegiatan FGD tentang Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional di Unsyiah Kuala

Selain itu Fachrul Razi juga memaparkan hasil temuan tentang realitas lapangan pada wilayah perbatasan yang kebanyakan disebabkan oleh kurangnya sarana-prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi penjahat



penyelundupan manusia dan barang serta kejahatan transnasional. Kondisi ini berhubungan dengan banyaknya warga negara Indonesia yang dideportasi oleh negara-negara tetangga karena melanggar aturan-aturan keimigrasian.

Dalam paparan tersebut Fachrul juga menjelaskan hasil pengawasannya terhadap wilayah perbatasan tidak lain yang harus dipadukan adalah soal peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan. Hal ini terkait Pembangunan Infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengelolaan sumber daya diperbatasan negara serta dilakukan optimalisasi kelembagaan pengelola wilayah perbatasan. Hal ini berkaitan dengan koordinasi dan keterpaduan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah perbatasan negara serta sinergitas evaluasi dan pengawasan program/kegiatan di wilayah perbatasan negara dan juga keterlibatan Stakeholders dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara.

Tidak hanya itu saja, bahwa yang harus ditingkatkan adalah soal kewaspadaan terhadap ancaman-ancaman internal dan eksternal dan pengelolaan pada wilayah perbatasan, caranya antara lain menerapkan secara maksimal penegakan Hukum dan Penjagaan wilayah keamanan laut, khususnya di wilayah perbatasan, mendorong Pos Lintas Batas sebagai instrument peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Rakyat di Perbatasan negara juga mendorong BNPP dan Pemerintah Daerah untuk membentuk sentra-sentra ekonomi di wilayah perbatasan, hal tersebut dapat memberikan kesempatan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia nomer 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi akan berjalan dengan baik⁵.

Sementara itu, Letjen TNI (purn) Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI menyampaikan bahwa dalam menantisipasi pergeseran geopolitik, geostrategi & geoekonomi di ASEAN yang dapat mempengaruhi Indonesia karena wilayah Indonesia khususnya Aceh berbatasan dengan beberapa negara Asean. Seperti bola liar konflik di laut China Selatan terus menggelinding dan menjadi bola panas dunia antara Amerika dan RRC yang ingin terus merebut dominasi wilayah di kawasan Asean. Dari rotasi konflik yang terjadi Laut China Selatan, Indonesia berada pada posisi strategis untuk dijadikan umpan dalam memperkeruh suasana, karena jelas kekuatan di luar asia semakin kuat, apalagi ada bisikan-bisikan dari Washington melalui tangan-tangan diplomatnya. Tentu Indonesia harus membangun poros maritim untuk melindungi kepentingan nasional dan asean⁶.

Nono Sampono juga menegaskan dalam porsinya beliau sebagai orang paham soal kemaritiman ingin mengejawantahkan gagasan Presiden Jokowi soal Indonesia menjadi poros maritim agar hal ini bukan sekedar wacana tapi sebuah doktrin yang menjadikan Indonesia negara berdaulat dan menjadi negara poros maritim. Menurut Nono Sampono tujuan Indonesia dalam gagasan poros maritim adalah ingin menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik, serta menjamin keamanan dan kelancaran arus

⁵ <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>

⁶ Hendi Asyono, Abimanyu. "Penguatan Reformasi Sektor Keamanan Di Wilayah Perbatasan (Border) Indonesia". Jakarta, Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Vol.3, No.2, (2020)



pelayaran di perairan Indonesia khususnya dari dan ke Laut Cina Selatan.

Hal ini sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Dony Nova R., S.Kom., M.Si Kepala SPKKL Aceh Mayor Bakamla bahwa dalam menjaga nilai strategis dan kepentingan nasional dalam menjalankan poros maritim harus mensinergikan keamanan wilayah perbatasan laut RI dengan menantisipasi meluasnya konflik dan bentuk kejahatan di Laut. Salah satunya dengan membangun sistem dengan cara berfikir yang hirarki, menyeluruh dan logis dengan melibatkan beberapa sistem negara seperti TNI AL atau sub sistem dari lembaga terkait. Lalu bagaimana strategi dan implementasi di lapangan ? Nova menjelaskan lebih jauh bahwa strategi dan kebijakan jangka pendek ini terus menghadirkan simbol negara secara konsisten dan tegas serta pelaku ekonomi di laut dapat meningkatkan sinergi pengelolaan Kamla, melalui implementasi PP 13/22 Gar Kamselgakkum, memaksimalkan pemanfaatan SDA dan penataan regulasi terhadap UU terkait di bidang kamla melalui UU Omnibus Law Keamanan Laut.

Dalam paparannya Dony Nova menjelaskan nilai strategis dan kepentingan nasional dalam menjalankan poros maritim adalah sebagai perlintasan ekonomi dan budaya, namun dalam hal ini ada peluang dan ancaman, peluangnya antara lain terdapat Potensi SDA, Potensi Perdagangan, peningkatan Lalu lintas, Potensi pasar, Potensi tenaga kerja. Sementara ancamannya infiltrasi budaya, konflik batas wilayah, *trans-crime*, Invasi militer dan Pencemaran Lingkungan. Meski begitu Bakamla tetap memprioritaskan kepentingan Nasional Indonesia di laut demi terciptanya keamanan dan keselamatan di laut Indonesia selain itu masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya kelautan⁷.

Dony Nova juga memaparkan beberapa kegiatan kejahatan yang terjadi di Laut, seperti penyelundupan narkoba, Hewan, Barang, Miras, BMK, bom ikan, Pelayaran Tanpa ijin, Anomali Muatan ilegal, Human trafficking dan lain sebagainya. Belum lagi menurutnya ada potensi ancaman LCS (Laut Cina Selatan) yang berkonflik antara beberapa negara di Asia, yang bisa berdampak langsung seperti terhadap Indonesia banyak kekuatan militer negara non-claimant hadir di Laut China Selatan, meningkatnya dinamika hubungan internasional terkait dengan LCS. Sementara ancaman tidak langsung biasanya seperti ada gangguan terhadap lalu lintas pelayaran, asuransi meningkat, biaya logistik meningkat berpotensi menciptakan krisis energi & ekonomi, Kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat utk meningkatkan kemampuan perangnya sehingga justru meningkatkan risiko pecah perang.

Terakhir, Nova memberikan rekomendasi terhadap kebijakan keamanan laut yaitu perlu optimalisasi terkait penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum dalam menjalankan UU No.32 Tahun 2014 beserta peraturan turunan sebagai pelaksanaannya. Kedua, perlu adanya peraturan dan perundangan yang sederhana, sehingga penegakan hukum di laut menjadi efektif dan efisien yang berdampak pada dukungan aktivitas pelaku ekonomi di laut. Tujuan tersebut harus diterapkan karena mengingat dampaknya sangat besar terhadap terciptanya ketahanan nasional karena sistem pertahanan harus dimaksimalkan baik di daratan maupun di lautan karena laut seperti yang

⁷ Sutisna, Muhammad, "Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional". Jakarta, Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.1, (2022)



disampaikan memiliki potensi ancaman cukup serius terhadap keluar masuknya aksi kejahatan dan penyelundupan barang haram. Terlebih lagi bila kebijakan di laut dan di daratan diterapkan dengan baik bukan hanya menciptakan ketahanan nasional melainkan akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini bila dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan maka akan sesuai dengan SDGs nomer 14 hingga 17 yaitu Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera, dan ekosistem pesisir untuk pembangunan berkelanjutan (14). Kehidupan di Darat: Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk penghijauan dan perlindungan ekosistem darat (15). Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat: Memastikan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta mengurangi kekeerasan, korupsi, dan tindak kejahatan lainnya (16). Kemitraan untuk Tujuan: Meningkatkan kemitraan global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (17)⁸.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Aceh yang dimulai dengan kegiatan pemantauan rumah singgah Bumi Moro dan FGD yang dilakukan di Kampus Universitas Syiah Kuala serta kegiatan lainnya di pulau Weh atau Sabang yang dihadiri oleh kalangan pemuda Aceh. Berdasarkan hasil analisis serta kegiatan pengabdian masyarakat yang turun ke lapangan menghasilkan beberapa kesimpulan. Antara lain :

1. Dikusi pra FGD yang dilakukan di Lounge VIP Bandara Aceh itu membahas hal ihwal pemerintahan Aceh dari berbagai perspektif, baik ekonomi, budaya dan politik nasional. Hasil obrolan santai tersebut mengarah terhadap perlunya perubahan UU PA (Pemerintahan Aceh) yang dinilai kurang efisien apalagi terkait Otonomi Khusus Aceh, termasuk soal anggaran yang tahun ini semakin menurun hal ini perlu dilakukan agar dapat menguatkan pemerintahan Aceh.
2. Dalam kunjungannya ke Rumah Singgah Bumo Moro memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak yatim tersebut agar senantiasa berbuat yang terbaik serta terus menjadi seorang yang berprestasi untuk meraih cita-cita demi masa depan dan dapat dibanggakan oleh bangsa dan negara, selalu giat belajar dalam menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Sementara Kaprodi Ketahanan Nasional UI juga memberikan arahan serta wejangan kepada adik-adik yatim untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, tidak patah semangat dan terus mengejar cita-cita setinggi langit.
3. FGD di Unsyiah Kuala selain membahas persoalan bagaimana mewujudkan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan juga melakukan sosialisasi program ketahanan nasional Universitas Indonesia. FGD ini dihadiri antara lain Dosen Universitas Indoneisa, Unsyiah Kuala, DPD RI, Bakamla, dan BNPP serta kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU pendirian Program Studi Kajian Ketahanan Nasional di Unsyiah Kuala Aceh,

⁸<https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>



- pendirian ini ditandatangani oleh Direktur SKSG dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Kuala.
4. Sosialisasi program Ketahanan Nasional UI di Lanal Sabang. Disambut oleh Komandan Lanal Sabang serta beberapa kesatuan lain yang juga mendampinginya yaitu Satradar Sabang, Lanud Sabang dan Komandan Marinir Sabang. Dalam pertemuan tersebut, sebelum diskusi soal kondisi keamanan Kota Sabang, tim Universitas Indonesia menyampaikan maksud dan tujuan datang ke Aceh, yakni melakukan FGD tentang pengelolaan wilayah perbatasan dan melakukan kerjasama pendirian Program Studi Kajian Ketahanan Nasional dengan Unsyiah Kuala. Selain itu mengunjungi situs sejarah di pulau Rubiah yang terdapat makam Siti Rubiah dan Karantina Asrama haji dan juga mengunjungi titik 0 kilometer.
 5. Pada FGD tentang Pengelolaan Perbatasan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional menghasilkan temuan tentang realitas lapangan pada wilayah perbatasan yang kebanyakan disebabkan oleh kurangnya sarana-prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi penjahat penyelundupan manusia dan barang serta kejahatan transnasional, maka perlu menerapkan secara maksimal penegakan Hukum dan Penjagaan wilayah keamanan laut, khususnya di wilayah perbatasan, mendorong Pos Lintas Batas sebagai instrument peningkatan ekonomi dan kesejahteraan Rakyat di Perbatasan negara juga mendorong BNPP dan Pemerintah Daerah untuk membentuk sentra-sentra ekonomi di wilayah perbatasan, hal tersebut dapat memberikan kesempatan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia nomer 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi akan berjalan dengan baik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Masyarakat PKN UI mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Syiah Kuala Bapak Prof. Ir. Marwan, IPU atas kerjasama dan fasilitasi kampus Unsyiah yang bisa kami pakai, Bapak Letjend (purn) Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI yang turut memfasilitasi kerjasama program Ketahanan Nasional dengan Unsyiah Kuala, Direktur SKSG UI Bapak Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D yang telah mempercayai kami dengan memberikan surat tugas untuk melakukan pengabdian masyarakat di Aceh serta dukungan kebijakan serta pengarahan yang baik kepada kami. Kami juga sangat mengucapkan terimakasih kepada Kolonel cpl Octavianus Oscar telah memfasilitasi dan memabntu kegiatan kami selama di Aceh. Tak lupa juga kami berterimakasih kepada Mahasiswa dan alumni PKN yang turut membantu serta mendoakan berjalannya program Pengabdian Masyarakat di Aceh dengan baik.

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, adanya kegiatan- kegiatan nanti sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Aceh.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Djoharis Lubis, "Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya Dari Perspektif Kependudukan". Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi (26 Juni 2016)
- [2] Hanita, Margaretha. " Ketahanan Nasional Teori, Adaptasi dan Strategi". Jakarta, UI Publishing (2021)
- [3] Hendi Asyono, Abimanyu (2020) Penguatan Reformasi Sektor Keamanan Di Wilayah Perbatasan (Border) Indonesia. Jakarta, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol.3, No.2, (2020)
- [4] Nur Alim Mubin, " *Sdg's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi*", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 8 Agustus 2021
- [5] Sutisna, Muhammad, "Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional". Jakarta, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 5, No.1, (2022)
- [6] Simon AJ Runturambi dan Paulus W. "Ketahanan Sosial Budaya Dan Pembangunan Papua Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 No. 10 (2022)
- [7] <https://poskota.co/nasional/wakil-ketua-dpd-ri-kunjungi-panti-asuhan-bumi-moro-aceh-besar/>
- [8] <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>
- [9] <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenai-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>
- [10] <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/01/21/menikmati-surga-alam-bawah-laut-di-pulau-rubiah-aceh>